

J. UPAYA PENYELESAIAN DAN PROGRAM KEDEPAN

1. JALAN DAN JEMBATAN

I. TEKNIS

A. Program Mendesak :

1. Inventarisasi Jalan dan Jembatan di seluruh Kota Medan kondisinya
2. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang rusak ringan maupun sedang
3. Peningkatan Jalan dan Jembatan yang rusak berat dan untuk kebutuhan penambahan kapasitas
4. Pembangunan Jalan dan Jembatan baru yang dibutuhkan
5. Pengadaan alat-alat pendukung pemeliharaan Jalan dan Jembatan
6. Penambahan UPT untuk mendukung pemeliharaan Jalan dan Jembatan

B. Program Jangka Panjang

Membangun jalan baru yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kota Medan :

- a. Penyelesaian TR-16 dan TR-17 Deli Serdang
- b. Eka Surya Terusan : Deli Serdang, M. Johor, M. Tuntungan
- c. Jalan alternatif RS Adam Malik - Pasar Melati – Jalan Lingkar Luar Barat
- d. Akses ke Pasar induk M Tuntungan
- e. CBD Polonia : HM Joni, AH Nasution, Jamin Ginting, Imam Bonjol
- e. CBD kawasan utara Medan :
 - Intersection KM 4,0 ujung tol - Lamhotma
 - KM 0,0 menuju Kp. Melayu - Lamhotma-Sentis-K.Namu
 - Highway menuju peti kemas Belawan
 - Wing Kiri dari Titi papan - hamparan perak- bulu kumba-langkat
- f. Fly Over : Jamin Ginting, Pinang Baris
- g. Subway : Bus, KRL (memanfaatkan jaringan rel KA yang ada)
- h. Jalan Tol Medan-Kuala Namu-T.Tinggi



LANJUTAN...

II. NON TEKNIS

1. Keterpaduan dalam penyusunan program dan alokasi dana / *cost sharing*;
2. Keterpaduan dalam koordinasi pelaksanaan, khususnya hubungan antar lembaga/*stakeholder* pusat, provinsi, kab/kota dan masyarakat, sehingga tidak terjadi *overlapping* dan miskomunikasi.
3. Diharapkan partisipasi Pemerintah Kecamatan dalam koordinasi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan pengawasan kerusakan infrastruktur, sehingga pemantauan kerusakan infrastruktur tersebut dapat dilaporkan melalui surat ataupun telepon selular.



2. DRAINASE

I. TEKNIS

A. Program Mendesak :

1. **Normalisasi** anak-anak sungai (tributaries) yang ada di kota Medan
2. **Pembersihan** seluruh endapan – endapan dalam saluran eksisting yang ada
3. **Identifikasi** dan evaluasi seluruh saluran eksisting primer dan sekunder yang ada
4. **Pembuatan Master Plan Drainase** Mikro yang selaras dengan Master Plan Drainase Makro
5. **Membangun drainase primer dan sekunder** untuk mendukung drainase yang sudah ada
6. **Pengadaan alat-alat pendukung pemeliharaan** drainase sekunder, primer dan sungai.
7. **Pengadaan alat telemetring** (early warning system) di sempadan sungai
8. Upaya Penyedotan dengan Pompa atau Pompa mobil pemadam kebakaran untuk lokasi yg sulit dan mengeras sedimennya.



B. Program Jangka Panjang

1. Penanganan Wilayah Hilir

Salah satu alternatif penanganan yang dapat dipertimbangkan adalah penggunaan **polder**. Polder cocok digunakan pada daerah-daerah yang berada kurang dari 5 meter diatas permukaan air laut. Untuk beberapa contoh, Contoh-contoh daerah yang dimaksud antara lain Kampung Mabar, Kawasan Industri Medan (KIM), dan Labuhan Deli.

2. Penanganan Wilayah Tengah

Sebagai bagian dari system operational dan maintenance maka perlu dipertimbangkan penyediaan fasilitas penggelontor (Flushing) untuk saluran saluran drainase yang ada. **Fasilitas Penggelontor** akan dibutuhkan selama musim kemarau, pada saat aliran lambat dan secara berurutan untuk beberapa hari. Kurangnya kecepatan dari aliran mengakibatkan berkurangnya, pula kemampuan membersihkan saluran, sehingga sangat potensial untuk menciptakan sedimentasi sepanjang saluran.

3. Penanganan Wilayah Hulu.

Beberapa alternatif penanganan wilayah hulu seperti pembuatan **Flood way, bendungan (dam)**, upaya konservasi alam, pemulihan kantong-kantong air dan retensi air dll.



II. NON TEKNIS

1. Pengelolaan DAS dari hulu sampai hilir dengan melibatkan seluruh instansi terkait (membentuk Dewan Air dan Tim Pemantau DAS);
2. Keterpaduan dalam penyusunan program dan alokasi dana / *cost sharing*;
3. Keterpaduan dalam koordinasi pelaksanaan, khususnya hubungan antar lembaga/*stakeholder* pusat, provinsi, kab/kota dan masyarakat, sehingga tidak terjadi *overlapping* dan miskomunikasi;
4. Usulan pembagian tugas dan wewenang yang jelas pada institusi pengelola banjir perkotaan dalam kerangka DAS;
5. Koordinasi pengelolaan tata ruang dan implementasi *law enforcement* garis sempadan sungai;
6. Koordinasi dalam pemberian informasi publik, sosialisasi, untuk masyarakat berperan serta dalam pengelolaan banjir perkotaan;
7. Membentuk kelembagaan koordinator pengelolaan atau organisasi gabungan dengan alternatif pola satu pintu atau banyak pintu.



